

One Nation - One Map Policy

Kebijakan Satu Peta dalam Penguatan Integrasi Bangsa

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar



One Map Policy: Latar Belakang

Isu Informasi Geospasial di Indonesia:?

Banyak Lapisan dan Banyak Aktor

- ❖ Lebih dari satu institusi menghasilkan peta serupa tanpa koordinasi;
- ❖ Beberapa peta tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang;
- ❖ Informasi yang berbeda semisal jumlah pulau dan luas hutan;
- ❖ Tumpang tindih izin penggunaan lahan (lisensi);
- ❖ Informasi Geospasial Dasar jarang dijadikan dasar membuat peta;
- ❖ Citra satelit untuk lebih dari satu institusi.

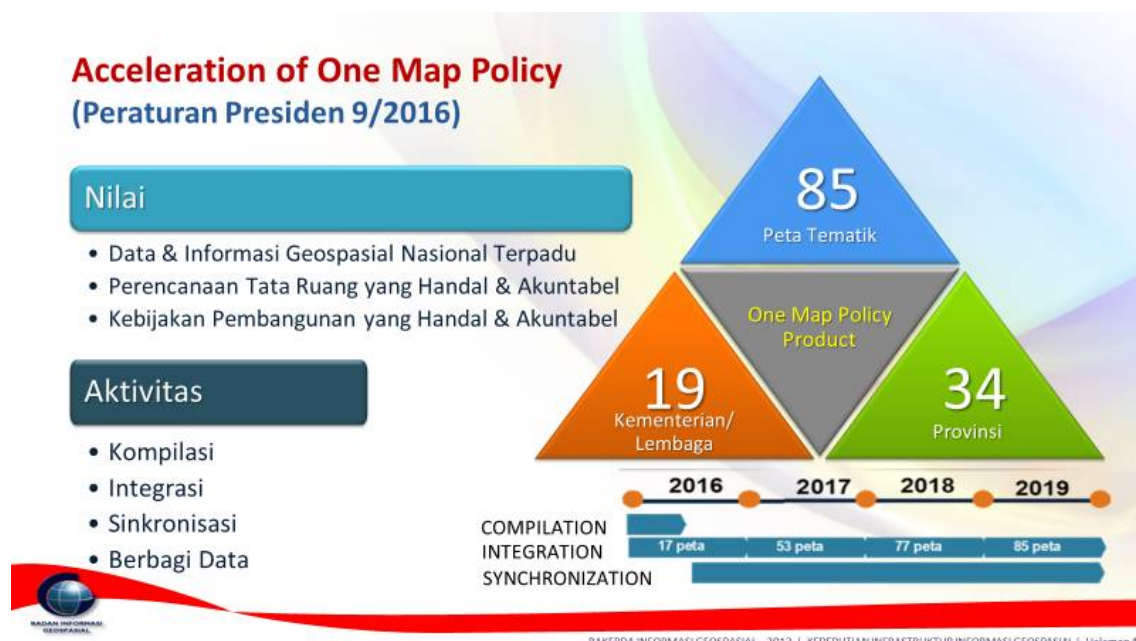
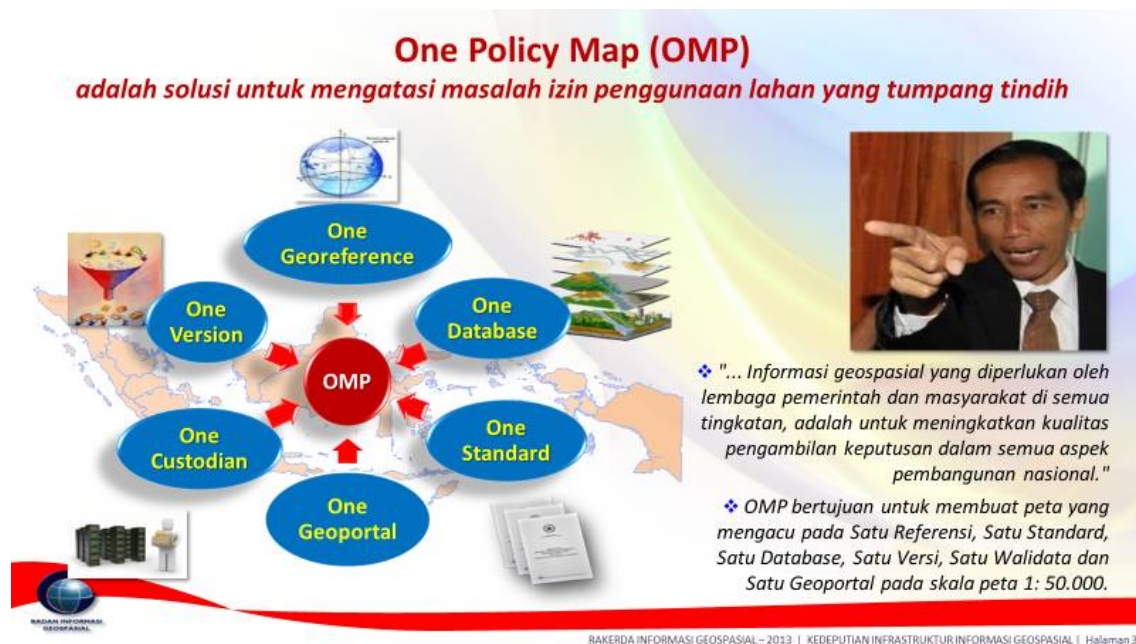


MASALAH DATA GEOSPASIAL:

- Georeferensi Tak seragam
- Ketersediaan Data Terbatas.
- Kedaluarsa dan Tidak Akurat.
- Aksesibilitas Sulit.
- Tidak ada Pemanfaatan Optimal, dll.

Proses pengambilan keputusan
berkualitas rendah dan akibatnya
menurunkan pencapaian tujuan
pembangunan nasional





19 K/L and 85 Peta Tematik



Catatan:

- Untuk Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000, penanggung jawab adalah BNPP dan Kementerian Luar Negeri
- Untuk Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000 dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000, penanggung jawab adalah Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian
- Untuk Peta Lahan Sawah skala 1:50.000, penanggung jawab adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN
- Untuk Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000, penanggung jawab adalah Kementerian LHK dan KKP



© 2014 Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) - Badan Informasi Geospasial (BIG) 3

85 Thematic Maps of OMP Program

1	Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), minimal pada skala 1:50.000	KLHK
2	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-KLHK)	KLHK
3	Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000	KLHK
4	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	KLHK
5	Peta Izin Usaha Pertambangan skala 1:50.000	ESDM
6	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	ESDM
7	Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1:50.000	ATR/BPN
8	Peta Hak Pengelolaan, minimal pada skala 1:50.000	ATR/BPN
9	Peta Hak Guna Bangunan, minimal pada skala 1:50.000	ATR/BPN
10	Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada skala 1:50.000	Kemendagri
11	Peta Izin Lokasi, minimal pada skala 1:50.000	ATR/BPN
12	Peta penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000	Kemenko Perekonomian
13	Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000	Kemendagri & Kemenko Per
14	Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000	Kemendagri & Kemenko Per
15	Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB), minimal pada	ATR/BPN
16	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	KPOT
17	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000	KPOT
18	Peta PP RTRW skala 1:1.000.000	ATR/BPN
19	Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000	ATR/BPN
20	Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 1:25	ATR/BPN
21	Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000	PPN/BAPPENAS
22	Peta RKP skala 1:250.000	PPN/BAPPENAS
23	Peta Penutup Lahan skala 1:50.000	BIG
24	Peta Perpres RTR KSN skala 1:50.000	ATR/BPN
25	Peta kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1.000.000	Kemenhan
26	Peta Rinci Wilayah Pertahanan skala 1:50.000	Kemenhan
27	Peta RZWP/K Provinsi skala 1:250.000	KKP
28	Peta Bagian RZWP/K skala 1:50.000	KKP
29	Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional skala 1:1.000.000	KKP
30	Peta Lokasi Pelabuhan perikanan skala 1:50.000	KKP
31	Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000	Kemenhub
32	Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000	Kemenhub
33	Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000	Kemenhub
34	Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000	Kemenhub
35	Peta Sebaran Jaringan Ref dan Stasiun KA skala 1:50.000	KEMRI
36	Peta jaringan listrik skala 1:50.000	ESDM
37	Peta sebaran lokasi gardu induk skala 1:50.000	ESDM
38	Peta lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000	ESDM
39	Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000	ESDM
40	Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000	ESDM

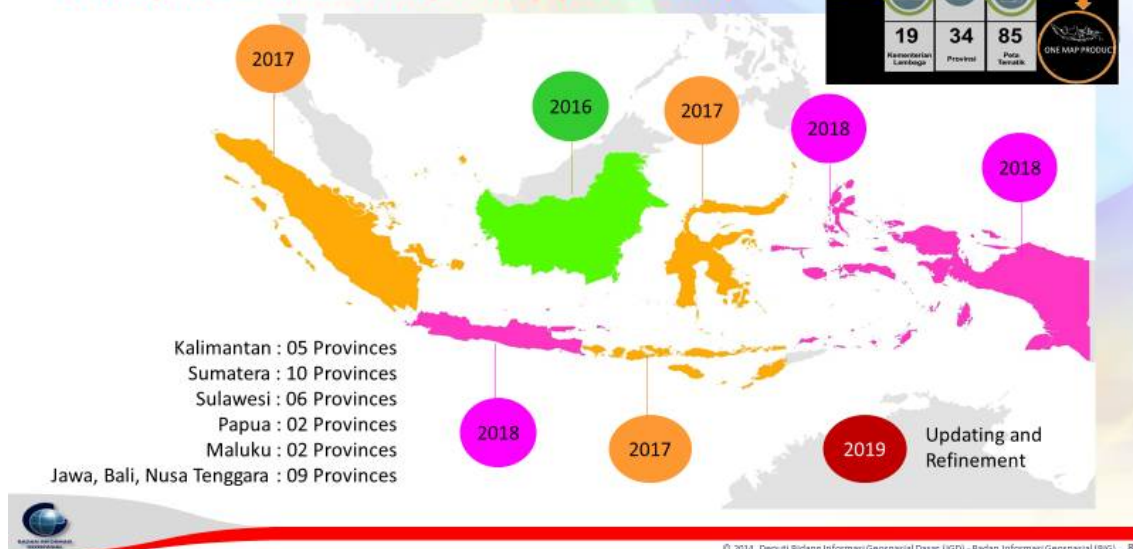
41	Peta Jaringan Sert Optik skala 1:50.000	Kemkominfo
42	Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten skala 1:50.000	PUPR
43	Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000	PUPR
44	Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Peng	PUPR
45	Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000	PUPR
46	Peta sebaran lokasi Bendungan skala 1:50.000	PUPR
47	Peta Daerah Irigasi Permukiman skala 1:50.000	PUPR
48	Peta Sebaran Lokasi Selo DAM skala 1:50.000	PUPR
49	Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000	PUPR
50	Peta Sebaran Lokasi Rusanawa skala 1:50.000	PUPR
51	Peta Air Tanah skala 1:50.000	PUPR
52	Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000	PUPR
53	Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000	ATR/BPN
54	Peta Lahan Gambut skala 1:50.000	Kemantan
55	Peta Neraca SD Hutan skala 1:250.000	KLHK
56	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000	KLHK
57	Peta Geologi skala 1:100.000	ESDM
58	Peta Kawasan rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000	ESDM
59	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000	ESDM
60	Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerenatan Gerakan Tanah skala 1:50.000	ESDM
61	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1:50.000	ESDM
62	Peta Hidrogeologi skala 1:100.000	ESDM
63	Peta Tanah Semi-detil skala 1:50.000	Kemantan
64	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000	BMKG
65	Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000	BMKG
66	Peta Lahan Sawah skala 1:50.000	ATR/BPN
67	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	Kemantan
68	Peta Jenis dan Kelangkaan Perikanan tangkap di WPPNRI skala 1:250.000	KKP
69	Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000	ESDM
70	Peta Sumberdaya Mineral skala 1:50.000	ESDM
71	Peta Sumberdaya Batubara skala 1:50.000	ESDM
72	Peta Sumberdaya Panasbumi skala 1:50.000	ESDM
73	Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000	BIG
74	Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000	BIG
75	Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000	Kemendagri
76	Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000	Kemendagri
77	Peta Batas Administrasi Desa/kelurahan skala 1:10.000	Kemendagri
78	Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000	Kemenlu & BNPP
79	Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000	Kemenlu
80	Peta Potensi Desa (sosial-ekonomi), minimal pada skala 1:50.000	BPS
81	Peta kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000	Kemendikbud
82	Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000	Kemendikbud
83	Peta Peningkatan Kawasan Hutan skala 1:250.000	KLHK
84	Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000	KLHK
85	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000	KLHK dan KKP

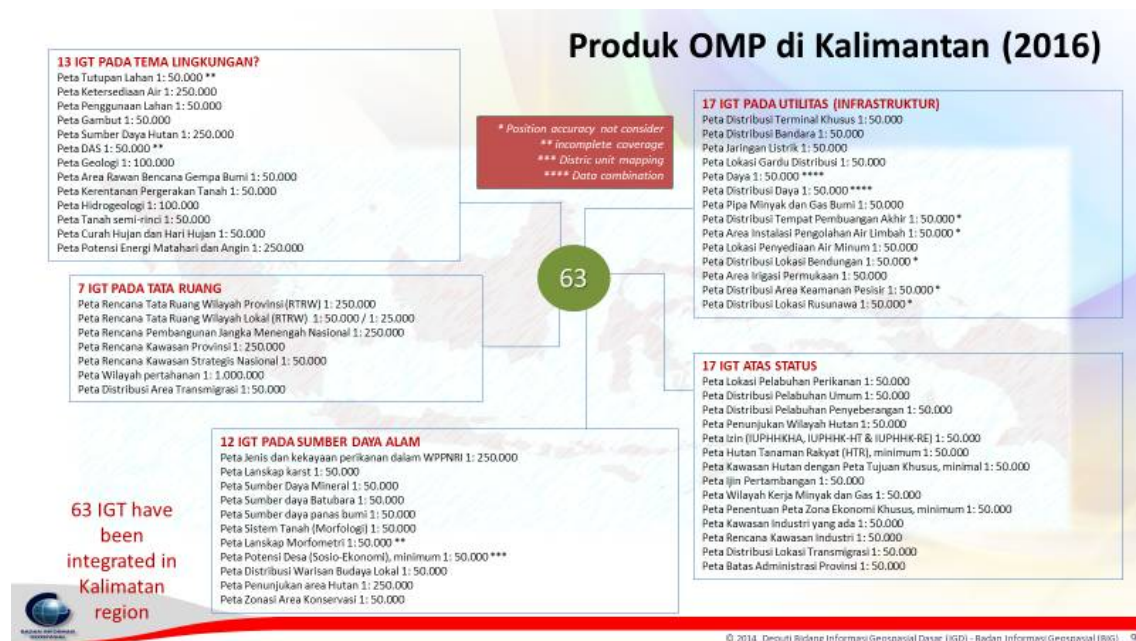


Langkah-langkah Kegiatan Kebijakan Satu Peta



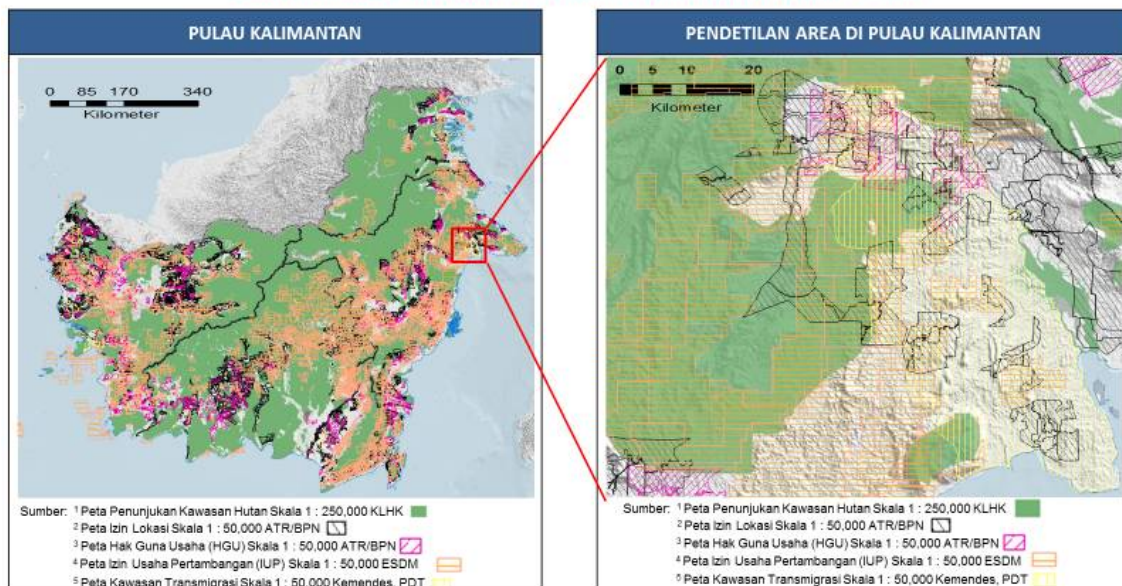
Priority Areas of One Map Policy (2016-2019)

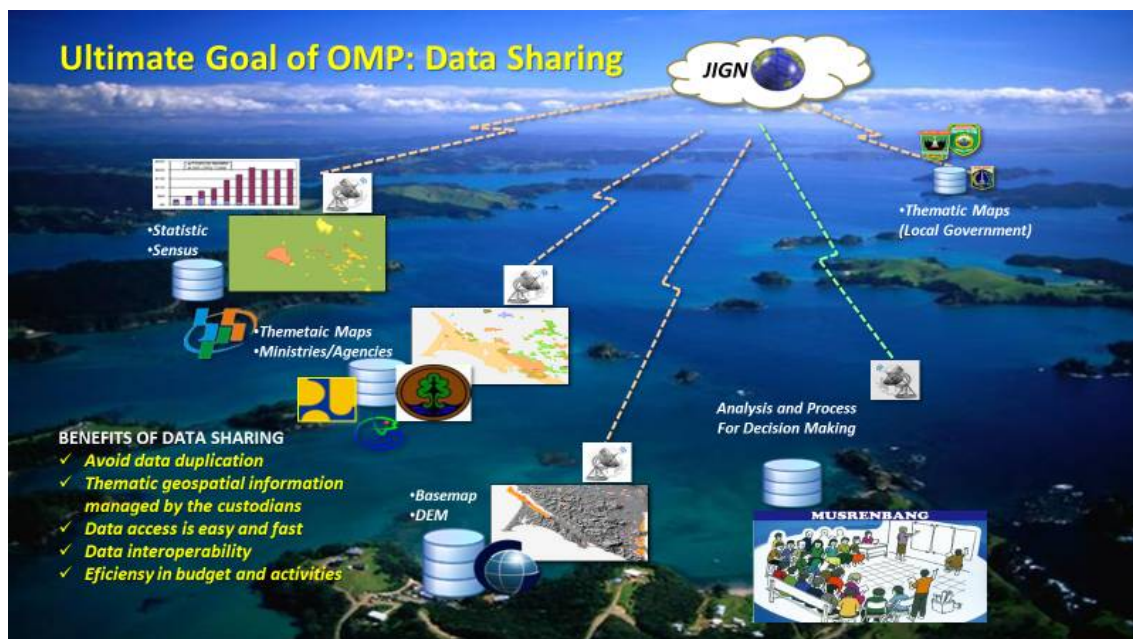
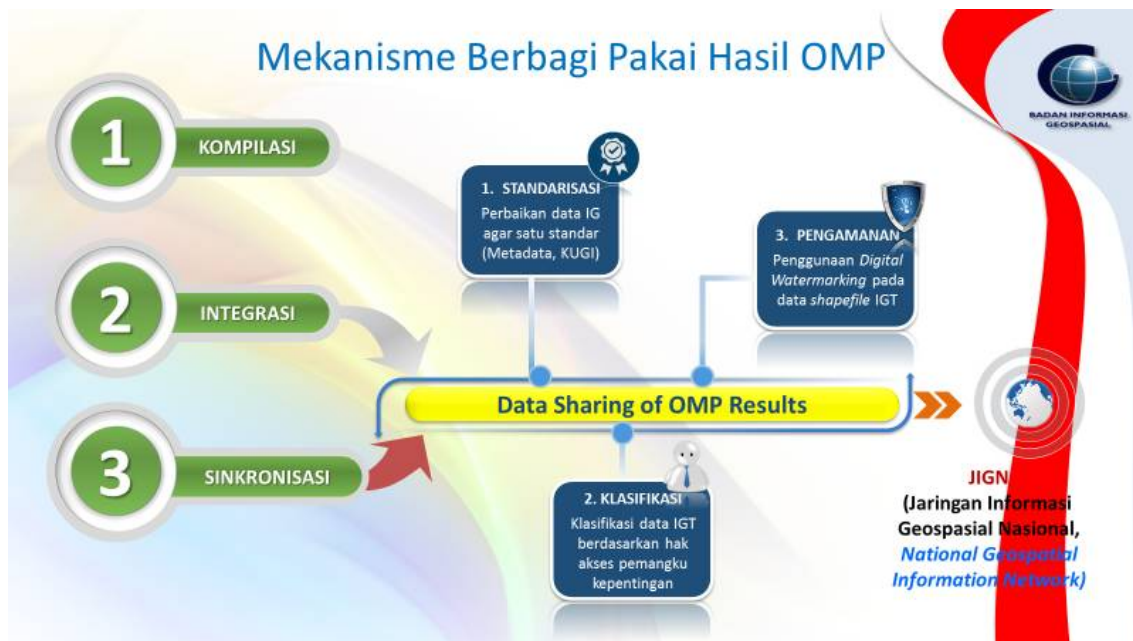




© 2014 Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) - Badan Informasi Geospasial (BIG) 9

Contoh Konflik Spasial antara Peta Status Hutan dan Peta Status Tanah





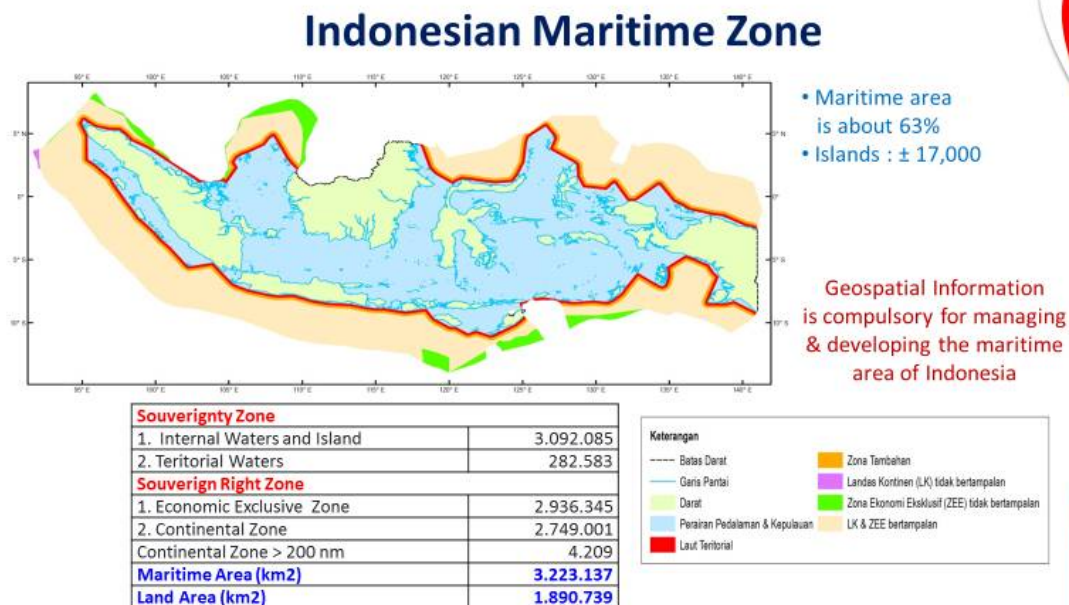




One Map Policy's Challenge

Tantangan Kebijakan Satu Peta





Permintaan Peta Dasar (terutama RBI)

Program	Skala dibutuhkan
One Map Policy	1 : 50.000
Pengembangan Pelabuhan (Tol Laut)	1 : 10.000 (LPI)
Pemetaan Desa	1 : 5.000
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)	1 : 5.000
Pengelolaan Gambut	1 : 2.500
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	1 : 1.000
Pengembangan Kota Cerdas (Smart City)	1 : 1.000
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	1 : 500 s/d 1 : 5.000

Saat ini, permintaan tertinggi untuk RBI Basemap adalah skala 1: 5000

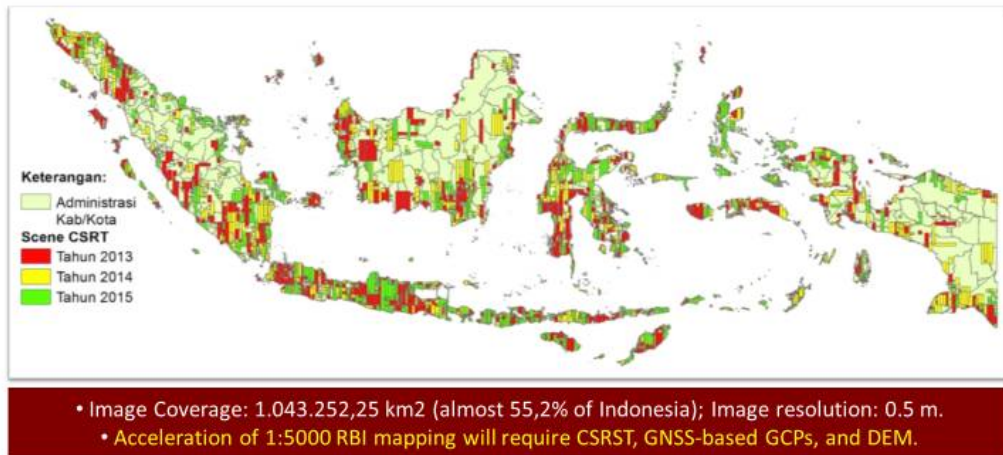


Ketersediaan Peta RBI (Status 2016)

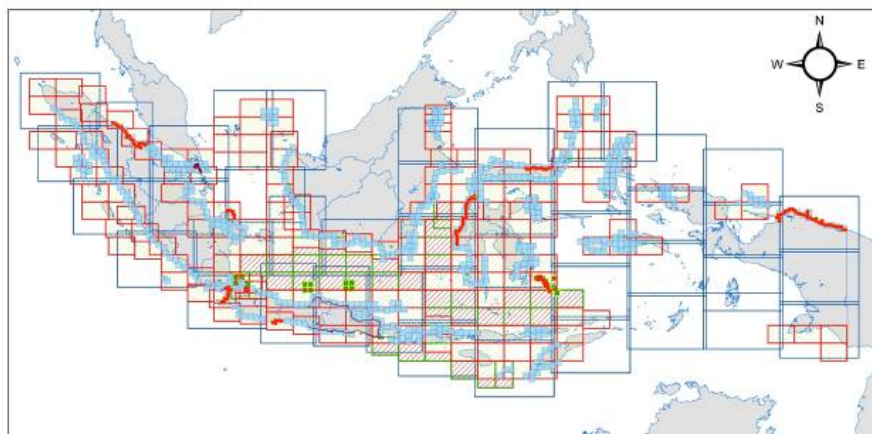
Scale	Cakupan Nasional	Ketersediaan Peta (NLP)	Ketersediaan Data (%)	Belum tersedia (NLP)	Belum tersedia (%)
1:1.000	-	very limited	very limited	-	-
1:5.000	379012	1579	0.42%	377433	99.58%
1:10.000	91547	1074	1.17%	90473	98.83%
1:25.000	13020	4781	36.72%	8239	63.28%
1:50.000	3899	3506	89.92%	393	10.08%
1:100.000	1259	26	2.07%	1233	97.93%
1:250.000	309	309	100.00%	0	0.00%
1:500.000	103	103	100.00%	0	0.00%
1:1.000.000	37	37	100.00%	0	0.00%



Cakupan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST), 2015



Index of Marine and Coastal Maps up to 2016

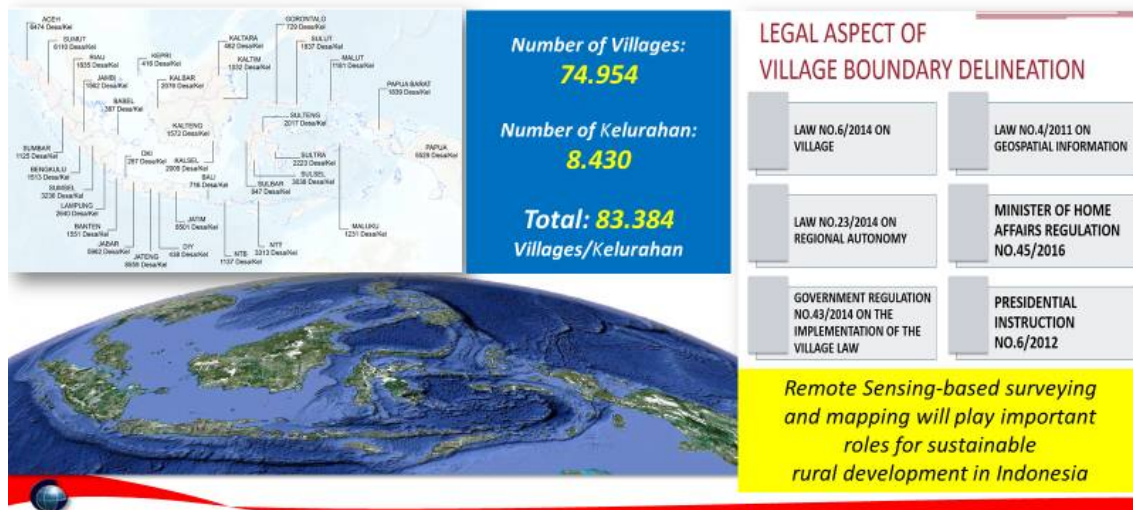


Legenda

Garis Pantai LPI25K LPI250K LLN250K
LPI10K LPI50K LLN50K LLN500K



Pemetaan Desa



Status Delineasi Batas Wilayah Desa/Kelurahan

DELINEASI BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN
Pusat Pemetaan Batas Wilayah

2013		2014		2015		2016		2017	
Kab/Kota	Jml Desa/Kel	Kab/Kota	Jml Desa/Kel	Kab/Kota	Jml Desa/Kel	Kab/Kota	Jml Desa/Kel	Kab/Kota	Jml Desa/Kel
Kab. Bogor	12	Kab. Bandung Barat	165	Kab. Karawang	278	Kab. Magelang	372	Kab. Tegal, Kota Salatiga, Kab. Rembang	466
Kab. Bantul	8	Kab. Tasikmalaya	8	Kota Surakarta	51	Kab. Belu	81	Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo	461
Kota Semarang	19	Kab. Gunungkidul	9	Kab. Sragen	199	Kab. Malaka	127	Kab. Kebumen, Kab. Grobogan	477
Kota Surabaya	8	Kab. Gresik	11	Kab. Blitar	31	Kab. Timor Tengah Selatan	278	Kab. Sukabumi	386
		Kota Pekalongan	8	Kota Batu	21	Kab. Jembrana	51	Kab. Garut	442
				Kab. Badung	24	Kab. Gianyar	70	Kab. Kediri	344
				Kab. Malang	39	Kab. Tabanan	133	Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kota Gorontalo	337
				Kab. Tulungagung	59	Kota Denpasar	43	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba Samosir, Kota Medan	348
				Kab. Boyolali	67	Kab. Klungkung	59	Kab. Bojonegara, Kab. Nigawi, Kab. Magetan, Kota Madiun	475
				Kab. Temanggung	222	Kab. Bangli	72	Kab. Karanganyar, Boyolali	377
				Kab. Klaten	401	Kab. Karangasem	78	Kab. Pati	406
						Kab. Buleleng	148	Kab. Demak, Kab. Semarang	484
						Kab. Lombok Barat	122	Kab. Lamongan	474
						Kab. Lombok Tengah	139	Kab. Jepara, Kudus	327
						Kab. Lombok Timur	254	Kab. Blora	295
						Kab. Kupang	177	Kab. Purworejo, Kendal	470
						Kota Kupang	51	Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, Kota Kediri	362
						Kab. Timor Tengah Utara	193	Kab. Bogor, Kota Bogor	502
								Kab. Sumba Timur	156
								Kab. Nganjuk, Kab. Malang, Kab. Tulungagung, Kab. Jombang	207
								Kab. Lampung Selatan	218

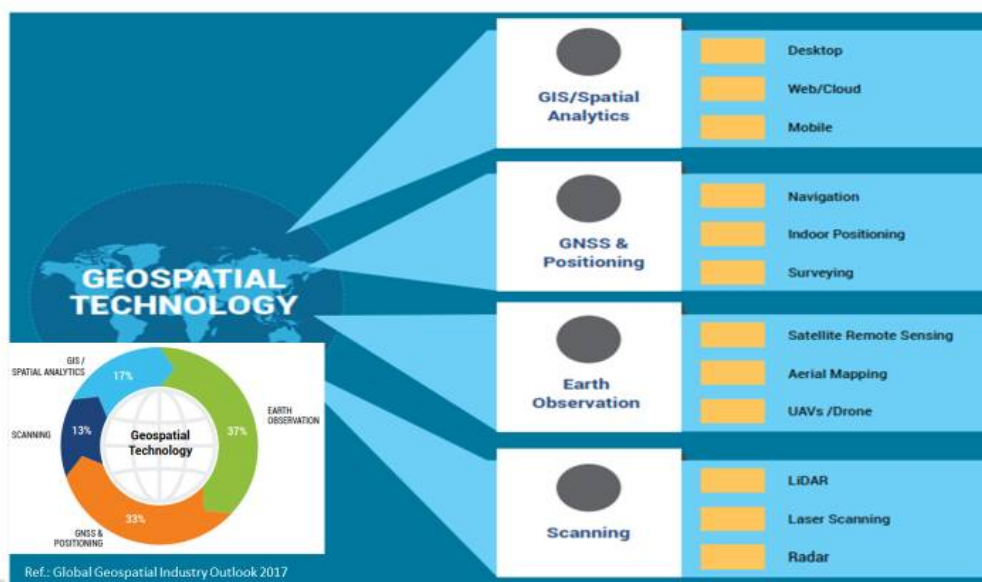
Total 12159 Desa/Kelurahan

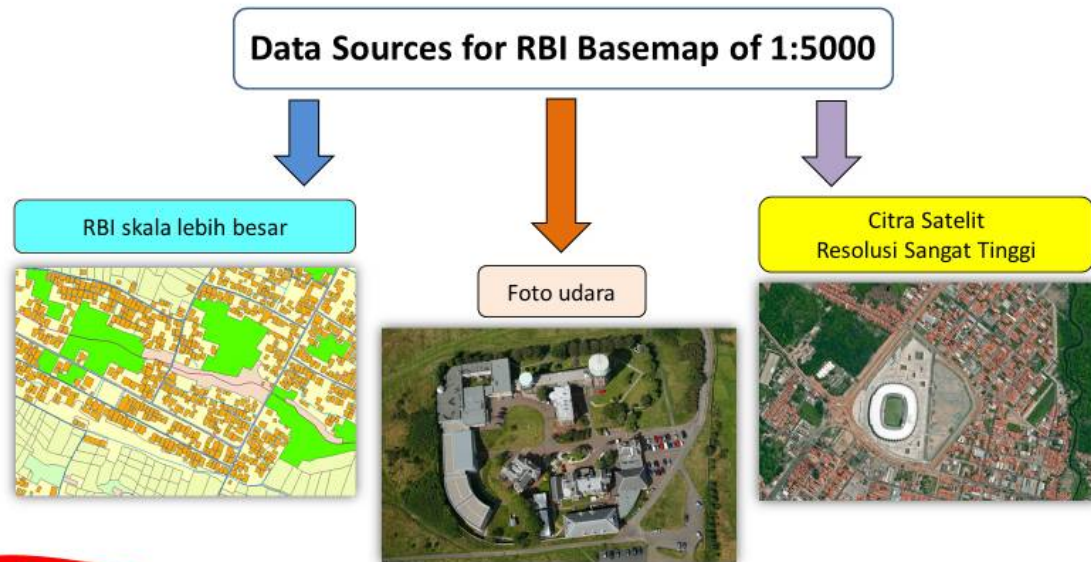
One Map Policy's Supporting Technology

Teknologi Pendukung Kebijakan Satu Peta



11811 Geospasial (BIG) 25



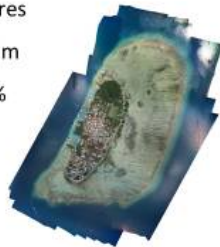


PEMETAAN PULAU KECIL

dengan Wahana Nir Awak (UAV)



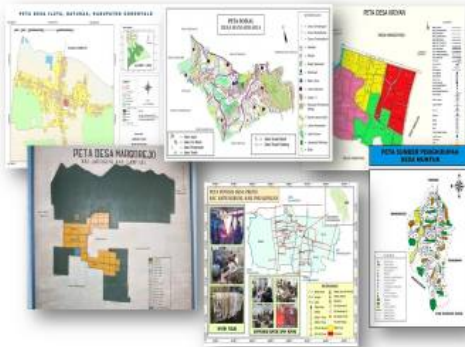
- Wahana: Custom Quadcopter
- Area: 200 hectares
- Ketinggian: 300 m
- Overlap: 60-80%
- Durasi: 5 hari
- GSD: 10,4 cm
- Skala: 1:500



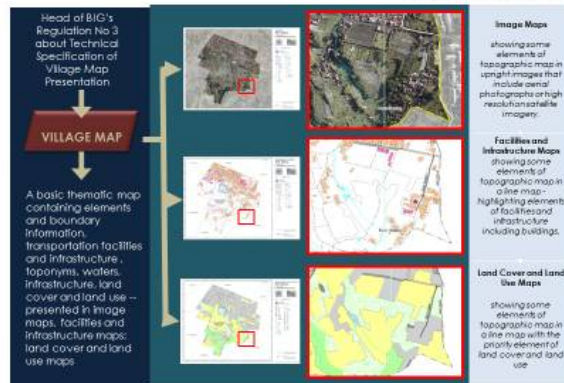
BERBAGAI PEMETAAN DESA

Memerlukan Standar Nasional

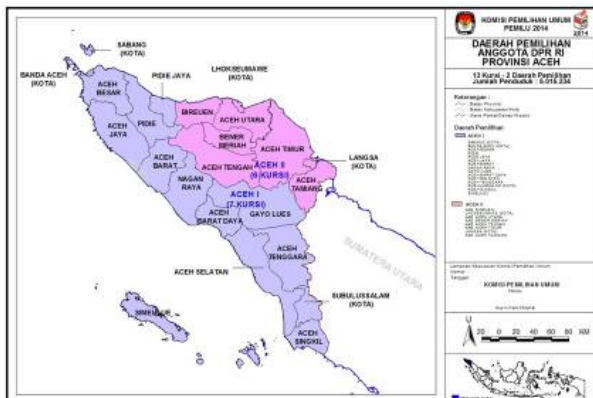
NO STANDARDS



STANDARDS



CONTOH APLIKASI OMP UNTUK DAPIL PEMILU 2019



PERTIMBANGAN:

1. Batas Administrasi
2. Topografi / Infrastruktur
3. Populasi
4. Kohesi Sosial